



GERAKAN PEMASANGAN BATAS TANAH

Direktur PT KSI Rosaliya Dewi (ketiga kiri) berfoto dengan warga penerima pembagian patok saat acara penanaman Gerakan Masyarakat Pemasangan Tanda Batas (Gemapatas) di Kampung Ujung Tebu, Ciomas, Serang, Banten, Jumat (3/2). Badan Pertanahan Nasional (BPN) Banten bekerjasama dengan pihak swasta mencanangkan pemasangan 280 ribu patok batas tanah pada tahun 2023 untuk mencegah terjadinya sengketa sekaligus mencegah percaloan dan mafia tanah.

Pemkot Tangerang Ingin Tekan Balita Stunting dari 11,8 Persen Jadi 5 Persen

Pemkot Tangerang telah melakukan studi banding ke Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, untuk melihat penanganan gizi buruk anak. Ternyata, sambung dia, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumedang telah melakukan pendataan by name by address tentang balita yang mengalami stunting. Data penanganan di Kabupaten Sumedang lebih responsive dan kebijakan itu akan direplikasi di Kota Tangerang.

TANGERANG (IM)- Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang mencatat angka kekerdilan (stunting) di wilayahnya mencapai 11,8 persen per 2022. Pemkot pun menargetkan stunting di wilayah kerjanya bisa diturunkan menjadi di bawah lima persen.

“Data menunjukkan bahwa angka stunting Kota Tangerang di 11,8 persen berdasarkan data tren stunting terakhir di 2022,”

kata Wali Kota Tangerang, Arief Rachadiono Wisman. Saat konferensi mengenai perkembangan stunting di Kota Tangerang, Provinsi Banten, Jumat (3/2).

Terkait dengan penanganan stunting, Arief mengaku, Pemkot Tangerang telah melakukan studi banding ke Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, untuk melihat penanganan gizi buruk anak. Ternyata,

sambung dia, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumedang telah melakukan pendataan by name by address tentang balita yang mengalami stunting.

Dia menegaskan, data penanganan di Kabupaten Sumedang lebih responsif. Arief menganggap, rencananya kebijakan itu direplikasi di Kota Tangerang. “Mudah-mudahan angka stunting di Kota Tangerang semula 11,8 persen bisa diturunkan seperti target di bawah lima persen,” ujar Arief.

Dia menyatakan, cara yang dilakukan yaitu dengan memberikan dukungan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) untuk percepatan penurunan stunting pada 2022 yang dinaikkan menjadi Rp 15,8 miliar. Padahal, di APBD 2021, alokasi ditetapkan sebesar Rp 10,3 miliar.

Sementara untuk sarana prasarana dalam penanganan stunting, ia menyebutkan di Kota Tangerang ada 1.092 pos pelayanan terpadu (posyandu), 37 pusat kesehatan

masyarakat (puskesmas), 34 rumah sakit swasta, satu rumah sakit umum daerah kota, dan satu rumah sakit umum daerah kabupaten.

“Namun, baru 20 puskesmas memiliki USG, 17 sisanya sudah diajukan ke Kementerian Kesehatan. Kemudian pengukuran antropometri baru tersedia 114, sedangkan Kota Tangerang masih kekurangan 978,” katanya.

Pemkot Tangerang berharap masalah kekurangan itu bisa dituntaskan dengan penghitungan manual. Bahkan, ia menyebutkan, masing-masing kader kesehatan di wilayah kerjanya mendapatkan insentif per tahun Rp 7 juta untuk melaksanakan kegiatan membantu program pemerintah pusat dan daerah, termasuk dalam menangani stunting.

Arief menyebutkan, Pemkot Tangerang melakukan beberapa intervensi spesifik dan spesifik. Di antaranya, memberikan edukasi, tablet tambah darah (TTD), skrining anemia pada remaja putri. Kemudian, untuk calon

pengantin ada pemeriksaan kesehatan, bimbingan perkawinan pranikah, nota kesepahaman dispensasi usia kawin.

Dia menyebutkan, pada ibu hamil ada pendampingan kader srikandi, kelas ibu hamil, pemberian TTD. Sementara pada bayi baru lahir membawa akta kelahiran, kartu keluarga, dan kartu Indonesia Sehat.

Kemudian, menurut Arief, untuk anak bawah lima tahun telah disediakan klinik pelayanan bayi stunting, pos gizi, pemberian imunisasi, suplemen vitamin A, pemberian obat cacing hingga bantuan dari tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).

“Ada pemberian bina keluarga balita (BKB) kit stunting untuk bina keluarga balita, dan terakhir ada peningkatan kompetensi sumber daya manusia (SDM) seperti pelatihan tenaga kesehatan, kader, pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK), hingga tim pendamping keluarga (TPK),” ujar Arief. ● pp

Puskesmas Teluknaga Tangerang Sasar Remaja Putri Bebas Anemia

TANGERANG (IM)- Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Teluknaga, Kabupaten Tangerang, Banten, menasar seluruh sekolah untuk mewujudkan Remaja Putri bebas dari kekurangan darah (anemia). Para remaja putri di sekolah menengah pertama (SMP)/sekolah menengah atas (SMA) sederhana diberikan Tablet Tambah Darah (TTD) dalam kegiatan ini.

“Anemia pada ibu hamil berpotensi menjadikan bayi yang dikandung pertumbuhannya kurang optimal, perlu adanya pencegahan pada usia dini. Salah satunya adalah dengan memberikan TTD kepada para remaja putri yang telah kita lakukan kemarin di Sekolah Insan Madani,” ujar Kepala Puskesmas Teluknaga, Husna Meiyanti, Jumat (3/2).

Program kegiatan bertajuk ‘Remaja Putri Bebas Anemia’ ini, kata Husna, akan terus dilakukan dengan menasar seluruh sekolah yang ada di lingkungan Puskesmas Teluknaga. Dalam kegiatan tersebut, pihaknya juga melakukan cek kesehatan seperti mengukur Lingkar Lengan Atas (LLA) guna memeriksa antropometri yang digunakan untuk mengukur risiko KEK pada wanita usia subur yang meliputi remaja, ibu hamil, ibu menyusui dan Pasan-

gan Usia Subur (PUS). Dia menambahkan, upaya pencegahan kejadian anemia pada remaja dapat dilakukan dengan berbagai hal. Salah satunya adalah memastikan pemenuhan asupan gizi yang seimbang. “Kondisi kekurangan gizi berupa zat besi merupakan salah satu penyebab utama anemia. Hal itu disebabkan oleh gaya hidup dari remaja di antaranya kebiasaan asupan gizi yang tidak optimal (khususnya sumber zat besi), kebiasaan minum teh serta kopi saat makan, dan kurangnya aktivitas fisik,” katanya.

Puskesmas Teluknaga berharap, dengan adanya kegiatan ini mampu mengurangi potensi anemia dan lahirnya bayi dalam keadaan stunting dari para ibu di Indonesia. Sehingga, nantinya dapat tercipta generasi muda dan generasi penerus yang sehat serta mampu berdaya saing ke depannya. “Bagi para remaja putri khususnya di Kecamatan Teluknaga, ayo lakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Mengingat hal tersebut dapat membantu mendeteksi suatu penyakit sejak dini sehingga penyakit tersebut dapat dicegah dan mendapatkan penanganan pengobatan yang tepat sebelum penyakit datang menyerang,” ujarnya. ● pra

Tingkat Kemiskinan Ekstrem di Tangsel Menurun Jadi 0,29 Persen

TANGERANG (IM)- Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang Selatan menyebutkan tingkat kemiskinan ekstrem tahun 2022 turun menjadi 0,29 persen dari sebelumnya tahun 2021 yakni 2,29 persen berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS).

Wali Kota Tangerang Selatan, Benyamin Davnie di Tangerang, Banten, Jumat (3/2) mengatakan penurunan angka kemiskinan ekstrem ini merupakan capaian yang luar biasa hasil kerja sama semua pihak. “Yang penting kemampuan kita pertama adalah melakukan musyawarah multifak serta kreativitas menentukan skala prioritas yang harus kita tempuh,” kata Wali Kota Tangerang Selatan, Benyamin Davnie dalam keterangannya.

Selain itu Wali Kota Benyamin juga mengungkapkan angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Tangerang

Selatan mengalami kenaikan yang semula 81,4 naik menjadi 81,95 pada tahun 2022.

“Terjadi peningkatan IPM dan yang luar biasa adalah penurunan angka stunting berkat kerja keras kita semua. Angka kemiskinan juga menurun,” ujarnya.

Wali Kota Benyamin pun mengajak semua pihak untuk berkolaborasi dalam pembangunan ke depan yang membutuhkan kerja sama dalam menyelesaikan masalah yang ada. Kota Tangerang Selatan telah berkembangan pesat menjadi daerah tujuan banyak orang sehingga harus terus ditingkatkan pelayanan dan diselesaikan masalah yang ada secara cepat dan tepat. “Kami mengajak peran aktif masyarakat dalam pembangunan Kota Tangerang Selatan ke depan dalam mewujudkan kesejahteraan dan warga yang unggul,” katanya. ● pp

Amankan Aset Pemkot Tangsel, BPN Pasang 500 Patok Tanah

TANGSEL (IM)- Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Tangsel memasang 500 patok tanah yang menjadi aset milik Pemkot Tangsel.

Kepala BPN Kota Tangsel, Harison Mocodompis mengatakan, pematokan upaya mengamankan aset-aset milik Pemkot Tangsel dan merupakan gerakan pemasangan 1 juta patok tanah yang diinisiasi oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang RI. “Gerakan pemasangan 500 patok di Tangsel terdiri dari 132 bidang tanah yang tersebar di 10 Kelurahan dan 6 Kecamatan,” ujar Harison di Perumahan Palembang Indah, Kecamatan Setu, Jumat (3/2).

Harison mengatakan, pemasangan 500 patok aset milik Pemkot Tangsel ditarget selesai hari ini juga dan akan dilaporkan ke Kementerian ATR RI sore harinya. Pihaknya kedepan akan tetap memprioritaskan pemasangan patok

aset milik Pemkot Tangsel, yang jumlahnya masih cukup banyak. “Jadi pemasangan 500 patok ini diharapkan menjadi keran pembuka untuk aset-aset lainnya yang diluar 132 bidang tanah tadi,” jelasnya.

Di tempat yang sama Wali Kota Tangsel, Benyamin Davnie mengatakan, gerakan pemasangan tanda batas dapat mencegah terjadinya sengketa tanah akibat tidak jelasnya batas tanah antara masyarakat.

Benyamin mengatakan, telah menginstruksikan pihak Kelurahan dan Kecamatan memanfaatkan program pematokan lahan untuk disampaikan kepada masyarakat Tangsel. “Pemasangan patok tanda batas adalah kewajiban setiap masyarakat sebelum mendaftarkan tanahnya. Ini yang perlu diketahui para Lurah dan Camat agar petugas dapat mengukur tanahnya lebih mudah dan dapat mengamankan tanahnya,” jelasnya. ● pp

173 Pejabat Pemkab Tangerang Dilantik, Ini Pesan Kepala BKPSDM

TANGERANG (IM)- Sebanyak 173 pejabat melakukan pelantikan dan pengambilan sumpah dalam jabatan fungsional melalui penyesuaian pasca penyeteraan jabatan di Lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang. Hal tersebut tercantum dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 800/2237/OTDA Tanggal 28 Maret 2022 mengenai tindak lanjut proses penyederhanaan birokrasi dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Tangerang, Hendar Herawan mengatakan terdapat 173 pejabat yang baru

saja dilantik.

“Hari ini ada 173 pejabat yang baru saja dilantik, dengan rincian 150 pejabat pengawas yang dilakukan pemberhentian dan pengangkatan ke dalam jabatan fungsional dan juga ada 23 PNS yang dilantik dalam jabatan fungsional melalui penyesuaian jabatan pasca penyeteraan jabatan,” ungkapnya.

Hendar berpesan kepada para pegawai yang baru dilantik agar dapat cepat beradaptasi dengan dengan lingkungan kerja masing-masing. “Karena sekarang sudah beralih menjadi fungsional, tentu ada perbedaan dalam menjalankan tugas. Kita harap cepatnya dapat beradaptasi dengan perbedaan tersebut,” tutuhnya. ● pp

RIBUAN WARGA TUMPAH RUAH RAYAKAN IMLEK

Bupati Sambas: Berdampak Positif bagi Perekonomian

SAMBAS (IM)- Masyarakat Kabupaten Sambas dan para tokoh yang ada di Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) tumpah ruah saat silaturahmi Imlek 2574 dan Festival Cap Go Meh, di Pemangkat, Sambas, Kalimantan Barat.

Acara ini diinisiasi oleh Bupati Sambas, H Satono, dengan mengundang ribuan warganya. Hal ini juga menjadi momentum bagi masyarakat Sambas setelah berakhirnya pandemi Covid-19 yang ditandai dengan dicabutnya pemberlakuan pembatasan masyarakat (PPKM) oleh pemerintah pusat.

“Kita patut bersyukur bisa kembali melakukan kegiatan seperti pada masa normal sehingga bisa melakukan silaturahmi dalam rangka menyambut Tahun Baru Imlek 2574,” ujar Satono, Jumat (3/2). “Dan tanpa adanya pembatasan mobilitas masyarakat semoga akan membawa dampak positif bagi kegiatan perekonomian masyarakat,” tambahnya.

Di tempat yang sama, Direktur Utama Bank Kalbar, Rokidi, mengapresiasi kegiatan ini. Karena sangat baik dalam merajut tali silaturahmi yang selama hampir tiga tahun tidak pernah dilakukan karena kondisi pandemi Covid 19.

“Oleh karena itu melalui perayaan Imlek dan festival Cap Go Meh tahun ini mengundang seluruh pengusaha sukses asal Sambas dan Singkawang untuk kembali ke tanah leluhurnya untuk kembali kampung halamannya untuk bahu membahu membantu pemerintah dalam membangun dan memajukan Kabupaten Sambas,” ujar Rokidi.

Hal senada juga diutarakan Wakil Direktur Utama Asuransi Cakrawala Proteks, Nicolaus Prawiro. Menurutnya banyak daerah di Provinsi Kalbar memiliki potensi ekonomi yang belum dikembangkan untuk kesejahteraan masyarakat.

“Provinsi Kalbar dan khususnya Kabupaten Sambas, memiliki potensi ekonomi yang bisa dikembangkan seperti di sektor pertanian, perikanan, dan pariwisata,” ujar Nico.

“Dan seperti yang diharapkan oleh Pak Bupati, Perayaan Imlek dan festival Cap Go Meh bisa menjadi kesempatan untuk putra-putra daerah tidak hanya bersilaturahmi tapi juga ikut memikirkan dan berkontribusi untuk kemajuan daerahnya,” tutup Nico.

Acara ini juga dihadiri Ketua Ikatan Alumni Amkur, Vinsent Efendi, Ketua Umum Perhimpunan Tionghoa Kalbar Indonesia, Fudy Luckman Ketua Dewan Kehormatan Perhimpunan Tionghoa Kalbar Indonesia, Jay Kian Sen, Wakil Ketua Umum Perkumpulan Wangsa Pemangkat, Tjhai Chui Mie, Mantan Wali Kota Singkawang, hingga Kapolres Sambas, Komandan Distrik Militer, Kajari dan DPRD Sambas. ● pra



INFLASI AWAL TAHUN KOTA SOLO

Pedagang dan pembeli bertransaksi jual beli kebutuhan pokok di Pasar Gede, Solo, Jawa Tengah, Jumat (3/2). Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Solo mencatat angka inflasi Kota Solo pada awal tahun 2023 atau pada Januari ini sebesar 0,32 persen lebih rendah 0,02 persen dari inflasi nasional sebesar 0,34 persen.

Ada Keluhan Pelayanan dari Masyarakat, Pegawai Puskesmas Cisata akan Dievaluasi

PANDEGLANG (IM)- Kepala Puskesmas Cisata, Kabupaten Pandeglang, Nining Yuningsih, mengaku akan melakukan evaluasi terhadap pegawainya atas adanya keluhan pelayanan kesehatan dari masyarakat Desa Ciherang Jaya.

Nining juga menyampaikan, permohonan maaf dan mengaku salah atas adanya keluhan pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan yang dipimpinnya tersebut. “Kami meminta maaf kepada masyarakat atas pelayanan yang kami berikan yang masih dirasa kurang optimal, dan kami juga meminta maaf kepada masyarakat atas pelayanan yang kami berikan yang masih dirasa kurang optimal, dan kami juga meminta maaf kepada masyarakat atas pelayanan yang kami berikan yang masih dirasa kurang optimal, dan kami juga meminta maaf kepada masyarakat atas pelayanan yang kami berikan yang masih dirasa kurang optimal,” ungkapnya Nining Yuningsih, Jum’at (3/2).

Nining juga mengatakan, kaitan dengan keluhan masyarakat Desa Ciherang Jaya soal pelayanan di Puskesmas, itu hanya sebatas miskomunikasi saja antara pihak pasien dan petugas di Puskesmas Cisata. “Hanya miskomunikasi kami rasa. Namun tetap kami men-

gaku salah dan mohon maaf kepada masyarakat. Saya akan evaluasi pegawai di sini guna perbaikan pelayanan kesehatan ke depannya,” katanya. Sementara, Camat Cisata, Asep Permana menyarankan, agar pihak Puskesmas Cisata menjalin komunikasi yang baik dengan masyarakat atau pasien, agar tidak terjadi kesalahpahaman. “Dan sampaikan dengan baik dan jelas kepada masyarakat atau pasien jika ada hal yang menyangkut kebutuhan pasien itu sendiri,” sarannya.

Camat menambahkan, dari kejadian ini diharapkan jadi pembelajaran dan bahan evaluasi bersama. Karena memang warga atau pasien yang datang ke Puskesmas ini merupakan warganya, untuk itu diliharapannya lagi agar komunikasi yang baik terjalin antara Puskesmas dan masyarakat. “Intinya ini jadi bahan evaluasi untuk perbaikan kita bersama ke depan. Selaki lagi, kami harap bangun komunikasi yang baik,” tandasnya. ● pra



JASA KONVERSI MOBIL KONVENSIONAL MENJADI MOBIL LISTRIK

Teknisi memasang komponen “motor controller” dan “on board charger” saat mengonversi mobil konvensional menjadi mobil listrik di Lengkung, Tangerang Selatan, Banten, Jumat (3/2). Biaya untuk konversi satu mobil tersebut berada di kisaran harga Rp250 juta sampai Rp900 juta tergantung dari jenis mobil dengan waktu pengerjaan dua sampai enam bulan.